

PERCEPATAN REFORMASI BIROKASI DAN INDEK TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI PROVINSI BANTEN

Oleh: Hasim Adnan

Sejarah mengajarkan bahwa reformasi adalah gerakan pembaharuan yang di lancarkan oleh kuasa rakyat sebagai koreksi total dan fundamental terhadap kekuasaan yang sedang berjalan, berdasarkan pertimbangan moral, ekonomi politik dan dokrinal, penting reformasi bukan hanya karena refomasi itu adalah sebuah sosial, melainkan karena reformasi merupakan sebuah momentum perubahan total dari semua aspek salah satunya adalah Reformasi Birokrasi di Indonesia tidak terlepas dari agar berjalan dengan baik, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menerapkan sembilan program untuk mencapai 8 area perubahan yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan *grand design reformasi birokrasi*. Dengan adanya **9 program Reformasi Birokrasi** tersebut diharapkan, akan mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah Daerah khususnya di Provinsi Banten agar lebih terarah dan berjalan dengan baik serta dapat mencapai tujuan akhir dari reformasi birokrasi tersebut Program-program reformasi birokrasi disusun sebagai langkah untuk mengatasi masalah-masalah mendasar yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Diantaranya seperti yang digambarkan dalam lingkaran dibawah ini. Oleh karena itu seluruh instansi pemerintah diharapkan dapat membuat sebuah kegiatan yang tepat dan dapat dengan cepat diterapkan dalam rangka mengatasi masalah-masalah diatas. Tentunya setiap kegiatan

searah dengan 9 program yang dicanangkan dalam reformasi birokrasi. Berikut 9 program reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang termuat dalam sebuah road map reformasi birokrasi.

Jika dilihat dari perkembangan daerah otonomi baru seperti provinsi banten yang sudah hampir berdiri 16 tahun semnjak terlepas dari provinsi Jawa Barat memiliki beberapa kondisi umum sebagai berikut :

Banten berdiri sebagai Provinsi tersendiri, terpisah dari provinsi Jawa Barat, berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2000 tentang pembentukan provinsi Banten dengan wilayah seluas 8.651,20 Km2 Provinsi yang berada di ujung barat pulau jawa ini berbatasan dengan selat sunda di sebelah barat,DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat di sebelah timur dan laut Jawa di sebelah utara dari lokasinya Banten meruakan penghubung antara jawa dan sumantra sertta merupakan daerah yang secara langsung menyangga kegaitan sosial ekonomi DKI Jakarta Pada awal berdirinya provinsi Banten terdiri dari empat kabupaten yaitu serang, Pandeglang, lebak tengerang dan Cilegon, namun sejalan dengan tuntutan perkembangan pembangunan di provinsi ini, dibentuklah kota serang dan kota Tangerang selatan, sehingga saat ini jumlah kabupaten dan kota di provinsi Banten menajdu 4 (empat) Kabupaten dan (empat) Kota Pada tahun 2010,jumlah penduduk di provinsi Banten mencapai 10.632.166 dengan komposisi 51 persen laki-laki dan 49 persen perempuan (Banten dalam angkkat 2012 :70) Dilihat dari distribusi tempat tinggalnya, lebih dari separuh penduduk di Banten berada diwilayah tanggerang (Kabupaten Tangerang,kota Tangerang dan Tangerang Selatan)

yang berdekatan dengan DKI Jakarta. Tahun 2011 laju pertumbuhan ekonomi Banten mencapai 6,43 persen sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun yang sama, PDRB perkapita di Banten sebesar 8.626.656,00 rupiah pada tahun 2011 (Banten dalam angka 2012 :74) evaluasi capaian kinerja dalam rancangan kerja pemerintahan daerah Banten tahun 2013 menunjukkan bahwa sampai dengan september 2011 jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja mencapai 5.210.224 dan tingkat pengangguran terbuka 13,06% (Banten dalam angka 2012 :78,92)

B. Penyelenggaraan Tantangan Tata Kelola Pemerintahan di Provinsi Banten

Suatu tantangan utama tata kelola pemerintahan di provinsi Banten adalah masalah ketimpangan pembangunan, pada tahun 2010 gini koefisien Provinsi Banten adalah sebesar 0,42 (BPS Provinsi Banten 2012) dan merupakan tiga besar provinsi paling timpang di Indonesia, bersama Gorontalo dan Sulawesi Tenggara, Tingginya gini koefisien ini menunjukkan bahwa perkonomian di Banten banyak dikuasai dan dinikmati oleh sebagai kecil elit Ketimpangan pembangunan ini terlihat juga dari distribusi PDRB di Banten yang sebagian besar di sumbang dari Kota Tangerang dan Kota Cilegon yang merupakan daerah jasa keuangan dan industry industri yang sama jika melihat PDRB perkapita PDRB per kapita kiat Tangerang mencapai lebih dari 16 Juta dan di Cilegon lebih dari 32 juta pada tahun 2011 sementara pada periode yang sama di kabupaten Lebak dan Pandeglang PDRB per kapita hanya berkisar antara 3 sampai 4Juta (Banten Dalam Angka 2012) Sebagai provinsi yang

berbatasan langsung dengan DKI Jakarta Banten menjadi salah satu penyangga kehidupan sosial ekonomi ibu kota tersebut, Dinamika yang terjadi di Jakarta secara langsung berpengaruh juga terhadap provinsi Banten, Setidaknya, ini terlihat dari perkembangan yang sangat pesat di wilayah Banten yang berbatasan langsung dengan Jakarta, Seperti Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang, yang sebagian besar warganya mengais rejeki di Jakarta, sayangnya hal ini tidak diikuti dengan perkembangan yang sama di daerah lain seperti di Lebak dan Pandeglang Dengan masih tingginya tingkat ketimpangan pendapatan penduduk dan pembangunan antara wilayah di Banten pemerintah perlu memberikan komitmen yang lebih tinggi untuk pemerataan pembangunan komitmen untuk pemerataan pembangunan ini perlu dilakukan baik secara sektoral maupun kewilayahan. Secara sektoral dengan memberi perhatian lebih besar pada sektor-sektor yang potensial yang meningkatkan pendapatan masyarakat banyak dan secara kewilayahan dengan perhatian yang lebih pada daerah-daerah yang relative tertinggal

C. Analisis Indeks Tata Kelola Pemerintahan

Indek Provinsi Banten Secara Keseluruhan, indeks tata kelola pemerintahan (IGI) provinsi Banten berada dalam kategori cukup dengan nilai 5,85, idek ini berada diatas rata-rata nasional 5,70 jika dilihat secara spesifik semua arena baik pemerintahan, birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi juga mendapat nilai yang lebih tinggi di banding arena yang sama di tingkat nasional (lihat grafik)

Arena	Indek Per Arena	Partis ipasi	Keadil an	Akun ta bilitas	TranPra nsi	efesiensi	Efektiiitas
Pemerintah	5,28	6,10	2,94	7,52	2,99	7,69	4,64
Birokrasi	6,05	6,57	5,52	6,62	3,25	9,18	6,17
Masyarakat Sipil	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40
Masyarakt Ekonomi	5,83	6,40	6,40	6,40	5,50	6,40	3,85

Secara Nasional, Provinsi Banten menempati peringkat 17 dari 33 Provinsi di Indonesia namun demikian jika di bandingkan dengan provinsi-Provinsi lain di wilayah Jawa dan Bali Banten menempati peringkat paling rendah Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan DKI Jakarta berturut-turut menempati peringkat 1,2 dan 3 di ikuti Bali di peringkat ke 5. Jawa Tengah berada di peringkat 16 sementara itu, Jawa barat yang merupakan provinsi Induk sebelum Banten memisahkan diri sebagai provinsi tersendiri menempati peringkat ke 15, Demikian juga jika dibandingkan dengan provinsi tetangga di seberang selat sunda, Provinsi Lampung Banten masih berada di posisi yang paling rendah Lampung menempati peringkat 10 dengan indeks sebesar 6,10 mungkin status Banten sebagai provinsi termuda, yang baru lahir setelah masa reformasi turut berpengaruh terhadap kemampuan tata kelola pemerintahan di provinsi ini, Namun demikian jika dibandingkan dengan provinsi Bangka Belitung yang jug merupakan tetangga dan baru lahir

setelah reformasi indek tata kelola Banten masih rendah,Provinsi Bangka Belitung menempati peringkat 11 dengan indek sebesar 5,97 hal ini menunjukkan bahwa setatus sebagai provinsi baru tidak bisa menjelaskan kinerja tata kelola pemerintahan dari sekian data provil progress kemajuan indek tata kelola pemerintahan di provinsi Banten maka perlu adanya sebuah proses percepatan refomasi birokrsi sebagai pondasi dasar dalam hal ini komitmen dan berlangusungnya sebuah sistem pemerihthan yang baik adapun untuk mencapai sebuah sistem tata pemerintahan yang baik sebagai berikut :

1. Menejemen Perubahan

manajemen perubahan bertujuan untuk secara sistematis dan konsistensi dari sistem dan mekanisme kerja organisasi, pola pikir serta budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik. Target dari program ini adalah terciptanya komitmen dari seluruh elemen pemerintahan untuk melaksanakan reformasi birokrasi, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja, serta menurunkan resiko resistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Menejemen pemerintahan dalam kasus indek tata kelola pemerintahan di provinsi Banten sangat di perlukan tetunya menejemen perubahan ini bisa di implentasikan jika daya dukung semua komponen sistem pemerintahan di provinsi Banten dapat berjalan dengan baik adapun konsep dalam kontek menejemen perubahan harus harus dimulai dengan metode SWOT karena dengan SWOT ini nanti bisa terlihat indikator keberhasilan sistem pemerintahanh yang sudah di bangun adapun konsep SWOT untuk tata kelola pemerintahan banten sebagai berikut :

Struggle : Kekuatan, dimana pemerintahan banten harus jeli melihat potensi kekuatan yang ada kekuatan ini bisa kemudian dijadikan modal utama dalam proses implementasi tata kelola pemerintahan jika melihat realitasnya sebagai provinsi baru Banten memiliki potensi besar untuk berkembang ini bisa di buktikan dengan banyaknya sumber daya alam, dan daerah-daerah industri yang menjadi kekuatan penyumbang terbesar terhadap anggaran pendapatan belanja daerah (APDB) provinsi Banten

Weknes : Peluang, provinsi banten untuk berkembang sangat terbuka lebar hal ini di buktikan dengan di tempatnya salah satu kawasan di wilayah provinsi banten tepatnya Tanjung lesung menjadi daerah kawasan ekonomi khusus pariwisata tepatnya di kabupaten pandeglang hal ini menjadi peluang untuk menjadi daya dorong peningkatan perekonomian masyarakat di wilayah Banten selatan dan secara multi falyerefek memberikan dampak pada percepatan pembangunan di wilayah tersebut dan bisa meningkatkan tata keleloa indek pelayanan sistem pemerintahan

2. Penataan peraturan perundang-undangan

Salah satu program reformasi birokrasi inidiharapkan dapat meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. Efektifitas tersebut diantaranya dapat menurunkan tumpang tindih peraturan dari seluruh tingkatan pemerintahan serta efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan. "**kekosongan hukum**" dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Salah satu penyebab terjadi penyimpangan hukum dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di

provinsi Banten adalah belum lengkapnya produk hukum yang mendukungnya. Dengan dikelurakanya undang-undang 23 tahun 2014 yang mengatur kewengan dan kewajiban pemerintahan daerah baik itu urusan yang bersifat konkren mapun absolute, maka bisa dilihat bahwa pemerintahan di provinsi memiliki porsi yang lebih dibandingkan dengan kabupaten dimana ada beberapa wilayaha strategis,yang dalam hal ini pengeloalaanya di tarik menjadi kewenangan provinsi dari kabupaten kota antara lain : pertama pengelolaan hasil laut,pengelolaan pertambangan dan energi yang semua ini kewengan perpindahan bidang pendidikan khususnya bidang pendidikan kejuraaan dan menengah setidaknya udang-undang 23 tahun 2014 ini memberikan kesempatan penataaan untuk peningkatan muta kualitas sistem pemerintahan karean secara otomatis potesi pendapatan daerah akan secara lansung di kelola oleh pemerintahan provinsi Baten

3. Penataan dan penguatan organisasi

Program penataan dan penguatan organisasi ditujukan untuk mengatasi masalah yang paling sering muncul dari pemerintah terutama dari pemerintah daerah. Tujuan utama dari program ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 adalah untuk meningkatkan efesiensi organisasi kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.

Dalam draf aturan Draf Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang 23 tahun 2014 ini, menetapkan dinas dalam 3 (tiga) tipe, yaitu dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C, serta badan dalam 3 (tiga) tipe, yaitu badan tipe A,

badan tipe B, dan badan tipe C. Penetapan tipe dinas dan badan didasarkan pada jumlah skor variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD yang kemudian ditetapkan pembobotan masing-masing variabel yaitu 40% (empat puluh persen) untuk variabel jumlah penduduk, 35% (tiga puluh lima persen) untuk variabel luas wilayah dan 25% (dua puluh lima persen) untuk variabel jumlah APBD, tujuan dari penataan birokrasi ini, secara prinsip adalah untuk mewujudkan tatanan reformasi birokrasi agar bisa efektif dan efisien. Dengan adanya model tipologi ini di harapkan penataan sistem kerja birokrasi atau OPD (Organisasi Perangkat daerah) di provinsi Banten mampu melakukan kinerja secara professional sehingga terwujud indikator-indikator yang terukur yang di sesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan kinerja OPD tersebut

4 .Penataan ketatalaksanaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi.

Dalam kontenk ini indikator efektif adalah dapat membawa hasil dan berguna untuk kelangsungan pelayanan birokrasi di provinsi Banten, Efisien ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya) kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya)

Target program penataan ketatalaksanaan adalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen

pemerintah, provinsi Banten dengan adanya efisiensi proses manajemen pemerintah dan meningkatnya kinerja pemerintahan. Program ini bertujuan untuk menata dan menyempurnakan sistem organisasi dan manajemen pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota agar lebih proporsional, efisien dan efektif. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Menyempurnakan sistem kelembagaan yang efektif, ramping, fleksibel berdasarkan prinsip *good governance*;
2. Menyempurnakan sistem administrasi negara untuk mempercepat proses desentralisasi;
3. Menyempurnakan struktur jabatan negara dan jabatan negeri;
4. Menyempurnakan tata laksana dan hubungan kerja antar lembaga di pusat dan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota; serta
5. Menciptakan sistem administrasi pendukung dan kearsipan yang efektif dan efisien

5. Penguatan pengawasan

Dengan adanya program ini memungkinkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN pada seluruh instansi pemerintah. Target dari program ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang dari masing-masing kementerian/ lembaga/pemerintah daerah. Kegiatan yang menjadi prioritas antara lain adalah penguatan kembali peran SPIP. Unsur sistem pengendalian intern pemerintah terdiri atas unsur:

- a. lingkungan pengendalian;

- b. penilaian risiko;
- c. kegiatan pengendalian;
- d. informasi dan komunikasi; dan
- f pemantauan pengendalian intern.

Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia

SIMPULAN

Dalam kesimpulan ini dapat di jelaskan bahwa reformasi birokarasi bisa akan tercapai jika kemudian ada semua komponen kelembagaan pemerintahan mampu bisa melakukan konsolidasi, di interanal pemerintahan itu sendiri, reformasi birokrasi tidak bisa akan dijalankan jika tidak adanya sebuah sistem yang kuat dan juga di dukung oleh tingkat partisipasi masyarakat, perubahan tata kelola sistem pemerintahan di provinsi Banten bisa dikatakan berubah jika adanya politikel will atau komitmen politik dari pemimpin daerah itu sendiri, percepatan reformasi birokrasi mengajarkan agar kelembagaan pemerintah mampu bisa melayani masyarakat dengan maksimal dan bukan sebaliknya ingin di layani oleh masyarakat, disamping itu penataan regulasi kebijakan pemerintah dalam tatanan reformasai birokrasi dan arah perubahan kebijakan pemerintah harus mampu dan bisa diterjemahkan dan di pahami oleh semua komponen masyarakat agar out-put kebijakan harus, berpihak kepada kesejahteraan masyarakat di provinsi Banten,

Percepatan reformasi birokrasi dan arah perubahan kebijakan di provinsi Banten adalah sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan yang efeknya secara langsung di rasakan oleh masyarakat, jadi di perlukan cek dan ricek atas jalanya roda percepatan reformasi birokrasi di di provinsi banten sehingga out-put pada tataran menejemen perubahan, penataan perundan-undangan, penataan penguatan organisasi, pentalaksanaan pemerintah, penataan sistem menejemen apartur, penguatan pengawasan, akuntabilitas kerja dapat berpihak kepada kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia Governance Index 2012 : *Tantangan Tata Kelola Pemerintahan di 33 Provinsi Australian AID*

www.menpan.go.id/berita-terkini/3420-merajut-legecy-reformasi-birokrasi

Sarundajang, 2005. "*Babak Baru Sistem Pemerintahan Indonesia*", Kata Hasta Pustaka

Pemerintahan.net/ **9 reformasi-birokrasi/**

Taliziduhu Ndraha. Penerbit: Rineka Cipta. DAFTAR ISI. JILID *Kebyernolgy ilmu Pemerintahan*

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004

DAFTAR PUSTAKA

- Tim Lipi 2006 Judul Buku “ *Membangun Format Baru Otonomi Daerah*” LIPI Press, member of IKAPI Jakarta
- H.A.W. Widjaja, 2005. “*Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*” , PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Ida, Laode. 2005. “*Permasalahan Pemekaran Daerah di Indonesia*”, MediaIndonesia.
- Kaloh, J.2007. “ *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*” , Penerbit RineckCipta: Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*.Yogyakarta: ANDI
- Muchlis, Hamdi. 2008. “ *Naskah Akademik Tentang Pembentukan dan*

Penghapusan Daerah”, BPHN DEPKUMHAM RI:Jakarta.

Muluk, M.R Khairul. 2007. *“Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah”*, Bayumedia Publishing: Malang.

Mohammad Jimmi Ibrahiin. 1991. *Prospek Otonomi Daerah*. Semarang :Dahara Prize.

Prasojo, Eko. 2008. **“Jorjoran Pemekaran Daerah: Instrumen Kepentingan Ekonom Politik”**. Dalam Opini Jawa Pos.

Pratikno. 2008. *“Usulan Perubahan Kebijakan Penataan Daerah(Pemekaran dan Penggabungan Daerah)”*. PolicyPaper. Melalui: pratikno@ugm.ac.id

Sarundajang, 2005. *“Babak Baru Sistem Pemerintahan Indonesia”*, Kata Hasta Pustaka: Jakarta. Sumartini, L.1999. *“Peranan dan Fungsi Rencana Legislasi Nasional Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundangundangan”*. BPHN Departemen Kehakiman RI: Jakarta.

Syafrizal.2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Yuliati. 2001. **Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam menghadapi Otonomi Daerah**, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004